

DAFTAR PUSTAKA

Literature :

- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. cetakan ke 3
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Harahap, M. Yahya . 1986. *Segi-Segi Hukum perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Lubis, Suhrawardi K . 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, cetakan ke 2. Jakarta:
Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno . 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.
Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, AbdulKadir. 1991. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan
Udara*. Bandung : PT.Citra AdityaBakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung :
Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Hukum Pengangkutan Niaga*. cet. IV.
Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*;
Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, Adisasmita . 2012. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Yogyakarta
: Graha Ilmu.
- Reefani, Nur Kholis . 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta:
Imperium.
- Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soekardono. 1986, *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1992. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT.Citra Aditya.
- Sugiarto, Umar Said. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar
Grafika.
- Syahrani, H. Riduan . 2010. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*.
Bandung : PT. Allumni.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian (perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan [Angkutan Kereta api](#)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api (perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api.)

Permenhub Nomor 98 tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Sumber lain:

Aflah, 2009, "*Tanggung jawab PT. Kereta API Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian*". Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu. Vol, 2 No.1. Diakses pada 17 Januari 2020.

N, Dewang dan Leonardo, L. (2010). *Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik Bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik Bagi Kaum Difabel Di Kawasan Taman Suropati Menteng-Jakarta Pusat*. Planesa, 1(1). Diambil dari <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/planesa/article/view/508>. Diakses pada 30 April 2020.

Syafi'ie, M. 2014. *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, Inklusi* Vol.1, No. 2 Juli - Desember 2014, LSM Sigap Yogyakarta. Diakses pada 22 Maret 2020.

Tarsidi, Didi. 2008. *Aksesibilitas Lingkungan Fisik bagi Penyandang Cacat*. <https://file.upi.edu/Direktori/FIP>, diakses pada tanggal 17 februari 2020.

Wirawan, I.B. *Aksesibilitas Penyandang Cacat di Jawa Timur*. <http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/>. Diakses pada 16 Maret 2020.